

DPRD AWASI KETAT PROYEK APBD-APBN



kaltim.tribunnews.com

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, M Fatani Sohilauw menandakan, DPRD Provinsi Maluku akan mengawasi secara ketat segala program maupun kegiatan pembangunan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱ Provinsi Maluku maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)ⁱⁱ Tahun 2012. Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (20/3), M Fatani Sohilauw mengungkapkan, saat ini DPRD Maluku melalui Komisi-Komisi sedang melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dimulai sejak Bulan Februari hingga April 2013.

Pengawasan sejumlah proyek yang menggunakan APBD dan APBN di Maluku bukan merupakan kegiatan rutinitas semata, namun merupakan bahan evaluasi bagi DPRD guna melihat secara langsung apakah program pembangunan tersebut dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait sesuai laporan yang disampaikan kepada DPRD ataukah tidak. Menurut M Fatani Sohilauw, DPRD Maluku akan mengambil tindakan tegas, jika dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya proyek-proyek yang bermasalah atau dikerjakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ditegaskan juga bahwa proyek yang bermasalah tersebut harus diusut tuntas dan diproses hukum dan DPRD akan merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas setiap proyek yang dikerjakan tidak sesuai aturan.

Menurut M Fatani Sohilauw, DPRD akan mengawasi ketat semua proyek pembangunan yang didanai APBD maupun APBN. Komisi-komisi akan melaporkan untuk diparipurnakan dan jika ditemukan ada proyek yang bermasalah, maka akan direkomendasikan untuk diproses hukum.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku juga akan direkomendasikan untuk memperbaiki setiap kegiatan yang tidak sesuai aturan. Program maupun proyek fisik yang telah disetujui dalam APBD Maluku harus dilaksanakan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat di negeri seribu pulau ini dan jika ditemukan ada yang bermasalah, maka harus diambil tindakan tegas.

Untuk diketahui saat ini 4 (empat) Komisi di DPRD Provinsi Maluku sementara berada di sejumlah Kabupaten/Kota di Maluku guna mengawasi berbagai kegiatan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku baik yang menggunakan APBD maupun APBN Tahun 2012.

Sumber Berita :

Siwalima, 21 Maret 2013.

ⁱ **APBD, 1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

ⁱⁱ **APBN, 1.** rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; **2.** suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.